

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Deskripsi Geografi Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

DIY terletak di bagian tengah-selatan Pulau Jawa, secara geografis terletak pada 7o3'-8o12' Lintang Selatan dan 110o00'-110o50' Bujur Timur, dengan luas 3.185,80 km². Wilayah administratif DIY terdiri dari kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa, yaitu:

- a. Kota Yogyakarta (luas 32,50 km², terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan)
- b. Kabupaten Bantul (luas 506,85 km², terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa)
- c. Kabupaten Kulon Progo (luas 586,27 km², terdiri dari 12 kecamatan dan 88 desa)
- d. Kabupaten Gunungkidul (luas 1.485,36 km², terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa)
- e. Kabupaten Sleman (luas 574,82 km², terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa).

Berdasarkan bentang alam, wilayah DIY dapat dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi sebagai berikut:

1. Satuan fisiografi Gunungapi Merapi, yang terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial gunung api termasuk juga bentang lahan vulkanik, meliputi Sleman, Kota Yogyakarta dan

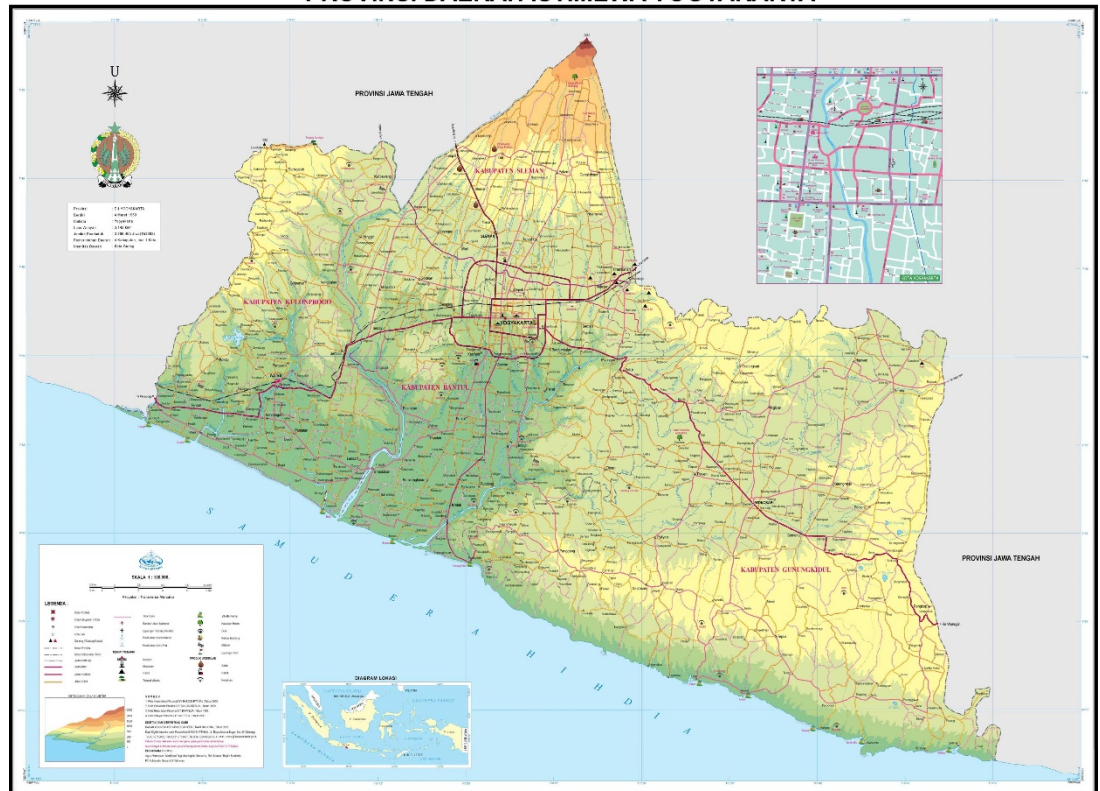
sebagian Bantul. Daerah kerucut dan lereng gunung api merupakan daerah hutan lindung sebagai kawasan resapan air daerah bawahan. Satuan bentang alam ini terletak di Sleman bagian utara. Gunung Merapi yang merupakan gunungapi aktif dengan karakteristik khusus, mempunyai daya tarik sebagai obyek penelitian, pendidikan, dan pariwisata.

2. Satuan Pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu, yang terletak di wilayah Gunungkidul, merupakan kawasan perbukitan batu gamping (*limestone*) dan bentang alam *karst* yang tandus dan kekurangan air permukaan, dengan bagian tengah merupakan cekungan Wonosari (Wonosari Basin) yang telah mengalami pengangkatan secara tektonik sehingga terbentuk menjadi Plato Wonosari (dataran tinggi Wonosari). Satuan ini merupakan bentang alam hasil proses solusional (pelarutan), dengan bahan induk batu gamping dan mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup sangat jarang.
3. Satuan Pegunungan Kulon Progo, yang terletak di Kulon Progo bagian utara, merupakan bentang lahan struktural *denudasional* dengan topografi berbukit, kemiringan lereng curam dan potensi air tanah kecil.
4. Satuan Dataran Rendah, merupakan bentang lahan *fluvial* (hasil proses pengendapan sungai) yang didominasi oleh dataran *aluvial*, membentang di bagian selatan DIY, mulai dari Kulon Progo sampai

Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Satuan ini merupakan daerah yang subur. Termasuk dalam satuan ini adalah bentang lahan *marin* dan *eolin* yang belum didayagunakan, merupakan wilayah pantai yang terbentang dari Kulon Progo sampai Bantul. Khusus bentang lahan *marin* dan *eolin* di Parangtritis Bantul, yang terkenal dengan *gumuk* pasirnya, merupakan laboratorium alam untuk kajian bentang alam pantai.

Kondisi fisiografi tersebut membawa pengaruh terhadap persebaran penduduk, ketersediaan prasarana dan sarana wilayah, dan kegiatan sosial ekonomi penduduk, serta kemajuan pembangunan antar wilayah yang timpang. Daerah-daerah yang relatif datar, seperti wilayah dataran fluvial yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul (khususnya di wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta) adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan memiliki kegiatan sosial ekonomi berintensitas tinggi, sehingga merupakan wilayah yang lebih maju dan berkembang, namun juga banyak terjadi pencemaran lingkungan.

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Gambar 1. Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

B. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Pendahuluan

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta berdiri mulai 1 Januari 2016 yang merupakan amanat dari Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Pergub Nomor 69 tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY merupakan gabungan dari 2 (dua) bidang dari Dinas Hubkominfo DIY (bidang PMI dan bidang LTMI),

UPTD Plaza Informasi dan Bagian Humas yang sebelumnya di bawah Biro Umum Humas dan Protokol. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY memfasilitasi dua lembaga, yaitu Komisi Informasi Provinsi (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Dari awal berdirinya hingga saat ini, Dinas Kominfo DIY terdiri dari satu (1) sekretariat dan lima (5) bidang yaitu:

- a. Bidang Manajemen Informasi (MI)
- b. Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)
- c. Bidang Fasilitasi Informasi (FI)
- d. Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informasi (PLTI)
- e. Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP).

2. Tempat dan Kedudukan

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY memiliki 3 (tiga) lokasi kantor yang berbeda, yaitu:

- a. Gedung Induk di Jalan Brigjen Katamso (Sekretariat, Bidang IKP dan Bidang Fasilitasi Informasi);
- b. Komplek Kepatihan, Unit 7 lantai 1 dan 2 (Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informasi dan Manajemen Informatika);
- c. Komplek Kepatihan, Balai Woro (Bidang Humas).

Alamat Surat:

Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta,
Daerah

Istimewa Yogyakarta 55152, Indonesia

- a. *Nomor Telepon:* (0274) 373444
- b. *Faximili:* (0274) 374496
- c. *E-mail:* diskominfo@jogjaprov.go.id
- d. *Website:* <http://diskominfo.jogjaprov.go.id>

3. Visi dan Misi

a. VISI

“Terwujudnya Jogja Cyber Province dan masyarakat informasi menuju peradaban baru mendukung keistimewaan DIY”

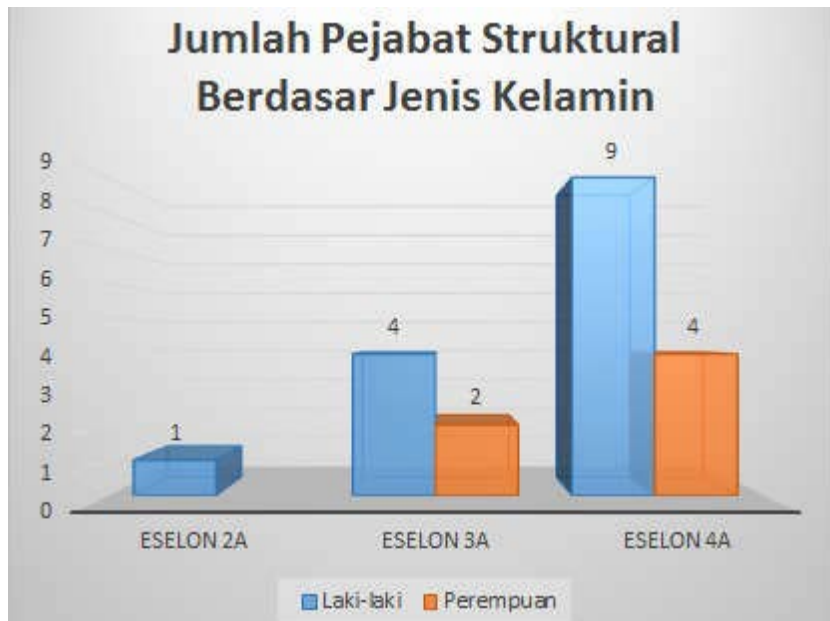
b. MISI

1. Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pamerintahan yang transparan dan akuntabel di DIY
2. Meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan informasi publik, pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika

4. Keadaan Pegawai

Kondisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dapat diperinci berdasarkan sebagai berikut:

- 1) Jabatan:
 - a. Pejabat Struktural Eselon 2A: 1 orang
 - b. Pejabat Struktural Eselon 3A: 6 orang
 - c. Pejabat Struktural Eselon 4A: 13 orang



Sumber: Diskominfo DIY, 2017

Gambar 2. Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan jenis Kelamin

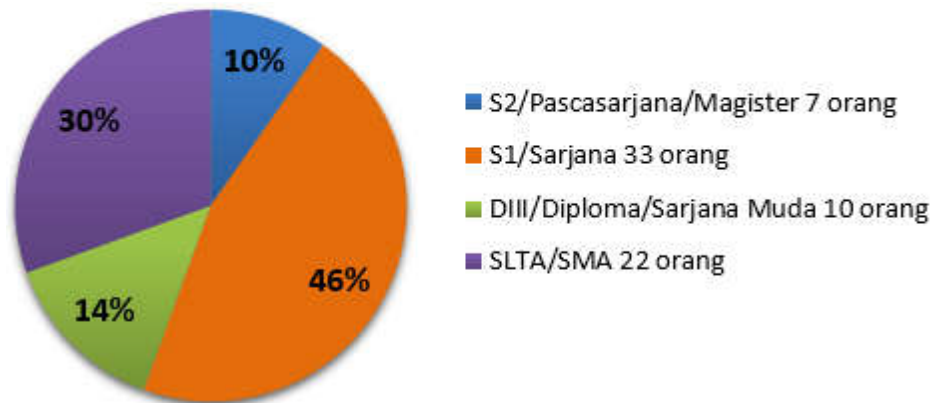
2) Golongan

- a. Golongan IV: 9 orang
- b. Golongan III: 63 orang
- c. Golongan II: 1 orang

3) Tingkat Pendidikan

- a. S2/Pascasarjana/Magister: 8 orang
- b. S1/Sarjana: 35 orang
- c. DIII/Diploma/Sarjana Muda: 8 orang
- d. SLTA/SMA: 22 orang

Presentase tingkat pendidikan pegawai Diskominfo DIY dapat dilihat dari gambar dibawah ini:



Sumber: Diskominfo DIY, 2017

Gambar 3. Presentase Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kominfo DIY

Presentase tingkat pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika DIY terbanyak 46% dari pendidikan S1, 30% pendidikan SLTA/SMA, 14% DIII/Diploma/Sarjana Muda, dan 10 % S2/pascasarjana/magister.

4) Jenis Kelamin

- a. Laki-laki: 47 orang
- b. Wanita: 30 orang

Jumlah dan komposisi pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY tersebut dibandingkan dengan kebutuhan ideal yang seharusnya 103 sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 122 tahun 2015 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana masih sangat jauh dari yang diharapkan dibandingkan dengan beban pekerjaan yang harus dihadapi. Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 122 Tahun 2015 Jabatan Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika sbb:

Tabel 1. Jabatan Pelaksana Diskominfo DIY

No	Bidang	Perkiraan Kebutuhan Pegawai Ideal (Orang)	Keadaan Pegawai Saat Ini (Orang)
1	2	3	4
	Kepala Dinas		1
1	Sekretariat		1
	Subbag Program, Data dan Teknologi Informasi	8	5
	Subbag Keuangan	8	7
	Subbag Umum	12	9
2	Bidang Hubungan Masyarakat		1
	Seksi Publikasi Dokumentasi dan Media Massa	13	12
	Seksi Penyiapan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	7	5
3	Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informatika		1
	Seksi Perangkat Keras, Pos dan Telekomunikasi	5	4
	Seksi Infrastruktur Telematika	8	3
4	Bidang Manajemen Informatika		1

	Seksi Aplikasi dan Keamanan Informasi	6	5
	Seksi Pengembangan EGovernment	7	3
5	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		1
	Seksi Pengkajian dan Penyiapan Informasi Publik	6	4
	Seksi Layanan Informasi Publik	11	5
6	Bidang Fasilitasi Informasi		1
	Seksi Fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	5	4
	Seksi Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi	6	4
	Jumlah	103	77

Sumber: Diskominfo DIY, 2017

Dari tabel diatas jumlah pegawai saat ini 77 orang dan jumlah ideal Dinas Komunikasi dan Informatikan DIY 103 orang. Sementara di saat yang sama komposisi diatas akan mengalami penurunan jumlah yang signifikan pada tahun 2017 dan 2018, dimana banyak pegawai pada tahun tersebut akan memasuki usia purna tugas.

5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan prasarana yang ada saat ini berupa:

Kantor ada 3 unit:

- a. Gedung Induk di Jalan Brigjen Katamso (Sekretariat, IKP dan Fasilitas Informasi);
- b. Bangunan di Unit 7 Komplek Kepatihan lantai 1 dan 2 (Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informasi dan Manajemen Informatika);
- c. Gedung bangunan Balai Woro Komplek Kepatihan (Bidang Humas);
- d. Studio Jogja Istimewa Televisi (JI-TV) di Unit 7 lantai 1 (bersebelahan dengan Bidang PLTI)

Kendaraan Roda 4 dan Roda 2:

Dinas Kominfo memiliki sarana penunjang operasional sejumlah:

- a. Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 11 unit
- b. Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 13 unit

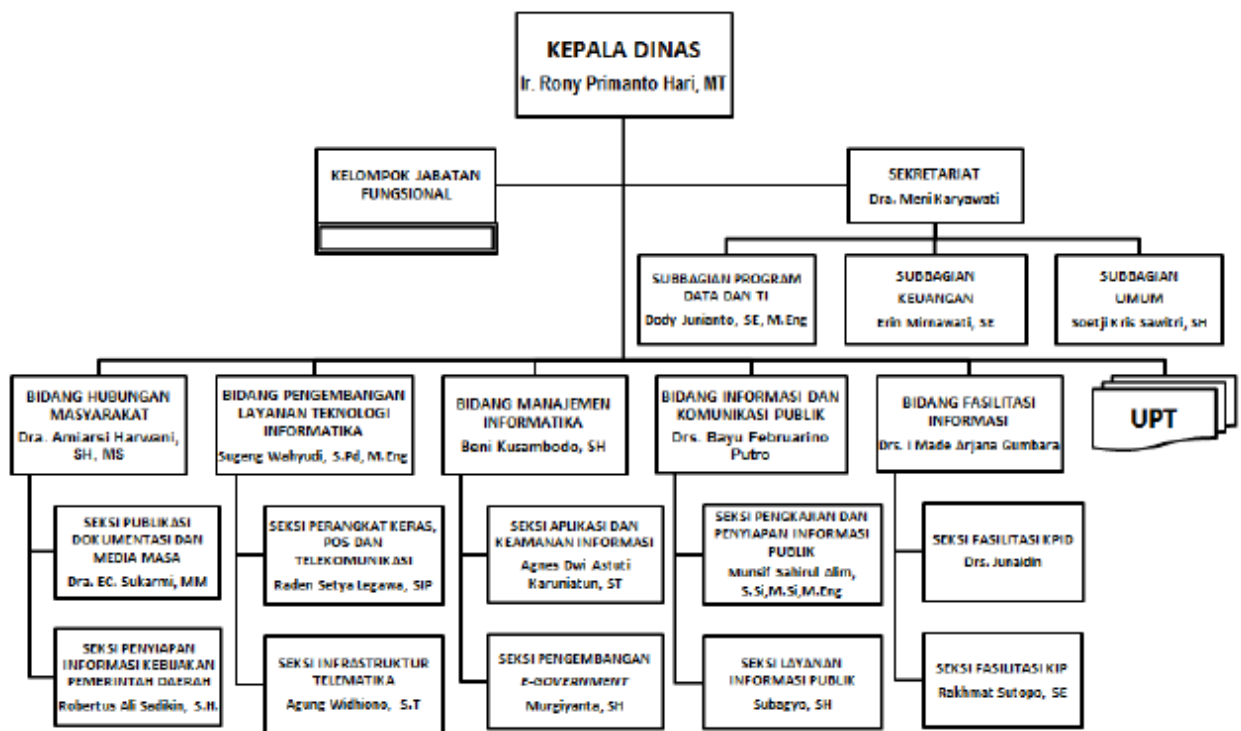
Sedangkan sarana prasarana yang lain dimasing-masing bidang berupa peralatan kantor seperti printer, komputer, laptop, genset, air conditioner (AC), telepon.

C. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. **Kepala**
- b. **Sekretariat**, terdiri dari :
 1. *Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;*
 2. *Subbagian Keuangan; dan*
 3. *Subbagian Umum.*
- c. **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, terdiri dari:
 1. *Seksi Pengkajian dan Penyiapan Informasi Publik; dan*
 2. *Seksi Layanan Informasi Publik Hubungan.*
- d. **Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informasi**, terdiri dari :
 1. *Seksi Perangkat Keras, Pos dan Telekomunikasi; dan*
 2. *Seksi Infrastruktur Telematika.*
- e. **Bidang Manajemen Informatika**, terdiri dari :
 1. *Seksi Aplikasi dan Keamanan Informasi; dan*
 2. *Seksi Pengembangan E-Government.*
- f. **Bidang Hubungan Masyarakat**, terdiri dari:

1. Seksi Publikasi Dokumentasi dan Media Masa; dan
 2. Seksi Penyiapan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah.
- g. **Bidang Fasilitasi Informasi**, terdiri dari:
1. Seksi Fasilitasi KPID; dan
 2. Seksi Fasilitasi KIP



Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Tanggal 2 September 2015 menetapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika DIY mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan DIY di bidang

komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika DIY mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pengendalian urusan di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan keterbukaan informasi publik;
- d. Penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Daerah;
- e. Pengembangan aplikasi dan keamanan informasi;
- f. Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi dan informatika;
- g. Pengembangan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara elektronik (*e-government*);
- h. Fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Komisi Informasi Provinsi;
- i. Penyelenggaraan diseminasi informasi dan layanan informasi publik;
- j. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi;

- k. Pelaksanaan, publikasi dan dokumentasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah melalui media;
- l. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Sejarah Pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pornografi yang terjadi di DIY tidak terlepas dari perkembangan industri pornografi yang sudah meningkat sejak dekade tahun 1990 dimana berkembangnya industri tersebut dipicu oleh maraknya teknologi *mass video* atau yang sering disebut sebagai sajian panas dalam bentuk putaran aktivitas seksual melalui sebuah video.

Memasuki abad ke-21, akses pornografi baik melalui video maupun gambar makin mudah diperoleh oleh masyarakat terutama masyarakat Yogyakarta seiring dengan berkembangnya internet. Salah satu model atau bintang pornografi yang pernah menjadi perbincangan di Yogyakarta pada saat itu adalah model dari Jepang yang bernama Miyabi. Sejak saat itu, media internet di Yogyakarta dipenuhi oleh akun pornografi dengan keterlibatan Miyabi di setiap situs terkait dengan aktivitas seksualnya.

Awal mula perkembangan industri pornografi di Yogyakarta juga banyak mengambil inspirasi dari dunia film seperti proses pembuatan film, pembuatan skenario, tata lampu terstruktur, hingga pengadaan audisi bagi para pemainnya. Namun belakangan ini, industri pornografi di Yogyakarta justru terlihat tidak terlalu teknis dalam pembuatannya yakni menampilkan gambar ataupun video yang benar-benar asli tanpa melibatkan proses penyaringan. Hal ini membuat para pengguna akun pornografi makin mendapatkan kepuasan yang dirasakan daripada bentuk media pornografi yang ditampilkan dengan menggunakan konsep teknologi seperti yang diciptakan oleh industri beberapa waktu yang lalu.

Selanjutnya, karena perkembangan industri pornografi di Yogyakarta sangat tergantung pada jaringan internet, maka semakin besar pula kesempatan para masyarakat Yogyakarta untuk mengaksesnya baik dari kalangan akademis maupun kalangan non akademis dengan berbagai variasi usia dari usia anak-anak hingga usia dewasa dimana hal itu diperparah dengan perilaku masyarakat yang dapat menggugahnya dengan tidak dibatasi oleh waktu tertentu sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat Yogyakarta seperti lunturnya nilai moral dan spiritual yang terjadi secara perlahan-lahan hingga kini dengan diperparah oleh kasus pergaulan bebas.

Saat ini industri pornografi di Yogyakarta tidak hanya dikuasai oleh para kelompok heteroseksual dan homoseksual, melainkan juga oleh kelompok lainnya, seperti kelompok transseksual, amatir, hingga feminis.

Hal ini menimbulkan perilaku kebebasan bagi mereka dalam mengekspresikan hasrat seksualnya dalam bentuk audio visual yang secara tidak langsung menciptakan industri pornografi secara pribadi. Sehingga masyarakat Yogyakarta pun mendapat lebih banyak pilihan dalam menonton pornografi yakni tidak harus menonton pornografi dari internet namun juga dapat menonton pornografi dari media yang mereka buat sendiri karena hal tersebut dirasa lebih dapat mendorong munculnya beragam kepuasan seksual baru dengan pasangan.